

ABSTRAK

Pengurusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seringkali mendapat sorotan masyarakat karena dianggap tidak profesional, tidak efisien dan tidak transparan sehingga menyebabkan bertambahnya beban negara yang harus mengeluarkan biaya untuk mempertahankan keberadaannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan yang menyebabkan tidak efisien dan tidak optimalnya kinerja pengurus dalam pengelolaan BUMN.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai status hukum keuangan BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pertanggungjawaban pengurus BUMN yang berbentuk perseroan terhadap adanya kerugian keuangan negara pada pengelolaan persero. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang konsep kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN, kerugian negara yang terjadi dalam BUMN dan bagaimana tanggung jawab pengurus BUMN apabila kerugian itu timbul. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus yang dilakukan melalui analisis bahan-bahan hukum berupa buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, makalah penelitian, dan sebagainya.

Sebagai hasil penelitian ini adalah ditemukan jawaban bahwa: Pertama, persero merupakan badan hukum seperti halnya perseroan terbatas, sehingga sebagai badan hukum, pada persero juga melekat karakteristik suatu badan hukum. Kedua, persero sebagai perseroan terbatas tunduk kepada UU BUMN dan UUPT serta segala prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas. Ketiga, status hukum kepemilikan harta kekayaan persero yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah bukan termasuk kekayaan negara. Keempat, tugas pengurusan BUMN yang dilakukan direksi tidak boleh dicampuri oleh pihak manapun selain organ perseroan. Kelima, kerugian yang terjadi dalam perseroan tidak serta merta menjadi kerugian negara, karena bisa jadi kerugian tersebut merupakan risiko bisnis yang harus ditanggung oleh perseroan sebagai entitas bisnis. Keenam, tidak dilaksanakannya *fiduciary duty* menjadi sebab Direksi dan/atau Komisaris tidak berhak memperoleh perlindungan sesuai prinsip *business judgement rule*, dan Ketujuh, pengenaan pidana korupsi terhadap pengurus BUMN tidak dapat serta merta dilakukan hanya dengan menggunakan unsur kerugian negara saja.

Kata Kunci: *Badan hukum, kekayaan negara yang dipisahkan, kerugian negara, pertanggungjawaban.*

ABSTRACT

The management of state-owned enterprises (SOE) has frequently become public scrutiny because it was considered as being unprofessional, inefficient and non-transparent, which caused the increasing of state's burden to spend more funds in order to maintain its existence. This has raised questions about the real source of the problem that caused such inefficiency and non-optimality of the officials' performance in managing SOE.

The main issues of this research are about the legal status of SOE's assets which derived from separated state assets and the responsibility of state-owned limited liability company officials towards any state losses over the company's management. This research intended to understand and analyze the concept of separated state assets within SOE, the loss of SOE and how the officials of SOE could be responsible for such loss. The research is normative legal research which done through statute, concepts, and case study approaches by analyzing legal materials in the form of law books, legislations, court decisions, articles, research papers, etc.

The results of this research are: First, limited liability SOE is a legal entity similar to a limited liability company, thus the characteristics of a legal entity were attached. Second, limited liability SOE as a limited liability company was subject to the provisions of SOE Act and Limited Liability Companies Act along with all principles applicable to a limited liability company. Third, the ownership upon SOE's assets which derived from separated state assets does not belong to the state. Fourth, intervention by any other parties upon the board of directors' duty of management is not allowed, except by the company organs itself. Fifth, the company losses do not automatically becoming state losses, since such loss could appear as a result of business risk. Sixth, if the directors do not perform fiduciary duties in managing the company, they shall not be granted protection, according to the principle of business judgment rule, and Seventh, the imposition of corruption against SOE's officials can not be necessarily done by using only the element of state losses.

Keywords: *Legal entity, separated state assets, state losses, responsibility.*